



LKIP TAHUN 2022

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



JL. SUKAPURA VI BOJONG KONENG SINGAPARNA Telp. (0265) 330163
Faximile (0265) 330163 Email : disperta@tasikmalayakab.go.id
SINGAPARNA 46415

KATA PENGANTAR

Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022 telah dapat kami susun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, saran dan pendapat kami harapkan demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Singaparna, Desember 2022

**KEPALA DINAS PERTANIAN,
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**



NURAEDIDIN, S.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650504 198403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	1
1.2. Struktur Organisasi	5
1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	6
1.3.1. Kekuatan Sumber Daya Pegawai	6
1.3.2. Sumber Daya Unit Operasional Teknis	8
1.3.3. Sarana Prasarana	11
1.4. Isu Aktual	14
1.5. Sistematisasi Penyusunan	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.1.1. Visi dan Misi	18
2.1.2. Perjanjian Kinerja	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
3.1.1. Indikator Capaian Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2022	34
3.1.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	42
3.1.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya	44
3.1.4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	46
3.1.5. Realisasi Anggaran	51

BAB IV. KESIMPULAN

4.1. Tinjauan Umum	70
4.2. Permasalahan dan Solusi	70
4.2.1. Permasalahan	70
4.2.2. Solusi	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Tugas Pokok: “ **Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang tanaman pangan, bidang kebun dan horti, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan.**”.

Dengan menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil, perbibitan dan produksi peternakan serta penyuluhan dan sarana prasarana pertanian serta bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
- b. Penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Penyelenggaraan pengembangan sarana pertanian, pangan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan mutu, peredaran dan
- e. pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. Penyelenggaraan pengawasan penggunaan sarana pertanian;

- g. Penyelenggaraan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- h. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan
- j. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. Penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pangan dan perikanan;
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan dan perikanan;
- m. Penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, pangan dan perikanan;
- n. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- o. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- p. Pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- q. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
- r. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis.

Susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

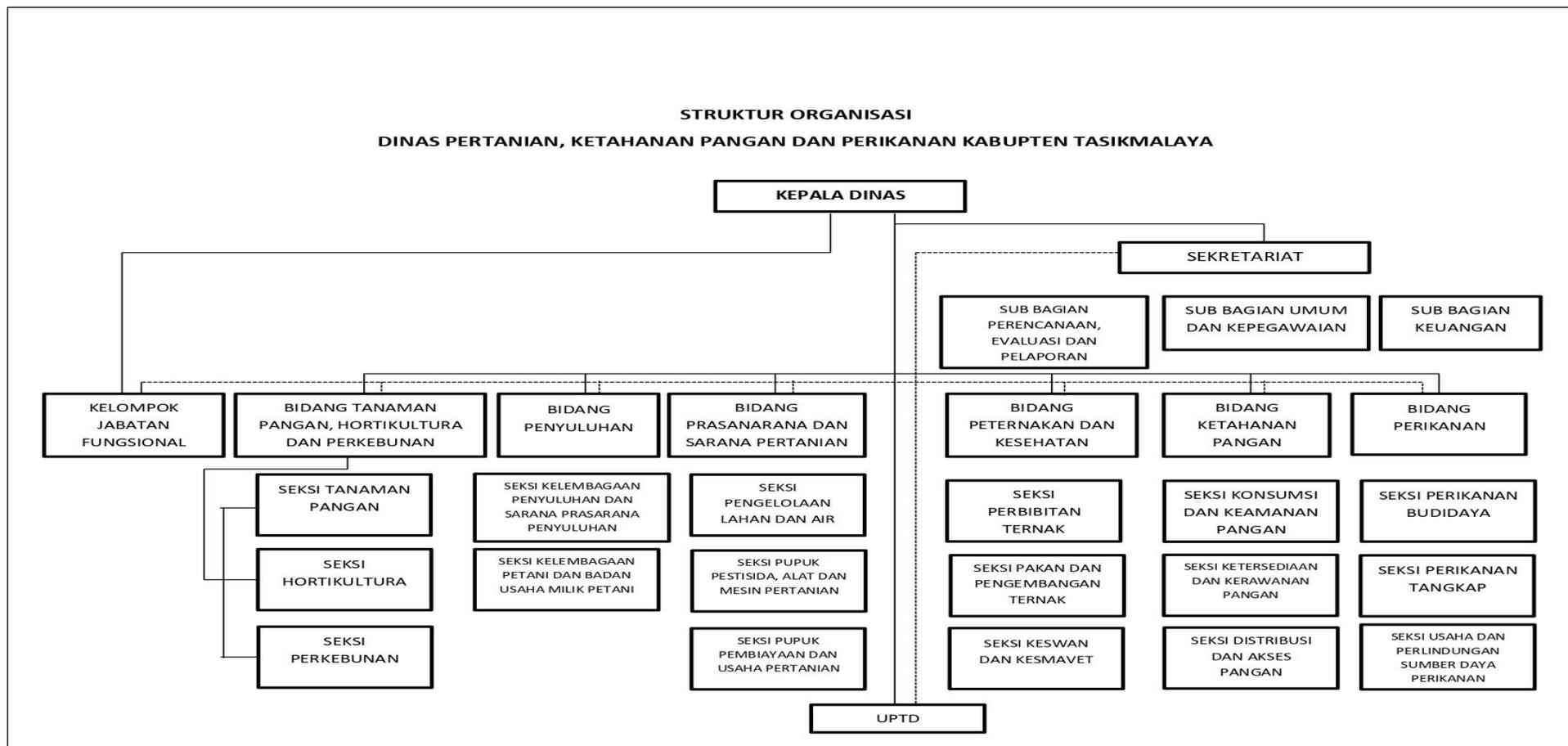
- Kepala Dinas;
- Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura; dan
 3. Seksi Perkebunan.
 - Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan;
 2. Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani;
 - Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Seksi Perbibitan Ternak
 2. Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - Bidang Sarana Prasarana Pertanian, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan Dan Air;
 2. Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian;
 - Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Akses Pangan; Dan
 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - Bidang Perikanan, terdiri atas:
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional

- Unit Pelaksana Teknis Daerah

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1.2. Struktur Organisasi



1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

1.3.1. Kekuatan Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai definitif ada 253 orang, meliputi 105 pegawai struktural dan 148 tenaga fungsional. Jumlah pegawai selengkapnya berdasarkan eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan	Golongan I	-
		Golongan II	47
		Golongan III	151
		Golongan IV	55
2.	Pendidikan	SD	-
		SMP	-
		SMA	89
		D1	2
		D3	14
		D4	36
		S1	69
		S2	43
		S3	-
3.	Eselon	II	1
		III	7
		IV	45

Sedangkan keadaan pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO	Jumlah Total Personal (org)	Jumlah Personil (org) berdasarkan Kualifikasi Pendidikan		Jumlah Personil (org) Berdasarkan Pangkat		Jumlah Personil (org) Berdasarkan Golongan		Jumlah Pejabat	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	253	SD	-	Juru Muda	-	1/a	-	Struktural 47	Penyuluh 126
		SLTP	-	Juru Muda Tk.I	-	1/b	-	Pelaksana 58	Medik veteriner 4
		SLTA	89	Juru	-	1/c	-		Pengawas Mutu Pakan 8
		D.I	2	Juru Tk.I	-	1/d	-		Pengawas Bibit Ternak 6
		D.III	14	Pengatur Muda	13	II/a	13		Paramedik Veteriner 4
		D.IV	36	Pengatur Muda Tk.I	5	II/b	5		
		S.1	69	Pengatur	22	II/c	22		
		S.2	43	Pengatur Tk.I	7	II/d	7		
		S.3	-	Penata Muda	50	III/a	50		

				Penata Muda Tk.I	27	III/b	27		
				Penata	31	III/c	31		
				Penata Tk.I	43	III/d	43		
				Pembina	19	IV/a	19		
				Pembina Tk.I	29	IV/b	29		
				Pembina Utama Muda	7	IV/c	7		

No	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat Struktural	47	
2	Pejabat Fungsional		
	a. Fungsional Penyuluh	126	
	b. Medik Veteriner	4	
	c. Pengawas Mutu Pakan	8	
	d. Pengawas Bibit Ternak	6	
	e. Paramedik Veteriner	4	
3	Pelaksana	58	
	Jumlah	253	

1.3.2. Sumber Daya Unit Operasional Teknis

Dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah dan Perbup Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilengkapi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut :

Tabel 1.3. UPT Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	UPT	Keterangan
1	Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	UPT penyedia benih unggul padi palawija (Mangunreja), UPT penyedia benih hortikultura dan perkebunan (Cimintar Cipatujah)
2	Perbibitan Ternak	UPT Sapi Potong Tawang dan UPT Kambing PE Malaganti (Penyediaan Bibit Sapi Potong dan Kambing Perah; Kemitraan Usaha Sapi Potong dan Kambing Perah
3	Rumah Potong Hewan (RPH)	RPH Manonjaya, RPH Singaparna dan RPH Ciawi (Pelayanan fasilitas pemotongan hewan ternak besar (sapi dan kerbau)
4	Puskesmas	Wilayah I,II,III
5	Laboratorium Veteriner	Kabupaten
6	Pasar Hewan	Pasar Hewan Manonjaya, Pasar Hewan Padakembang, Pasar Hewan Ciawi, Pasar Hewan Pancatengah (Pelayanan fasilitas perdagangan hewan

		ternak besar dan kecil (Sapi, Kerbau, Kambing dan domba)
7	Wilayah Pertanian	Taraju, Singaparna, Ciawi, Cikatomas, Manonjaya, Sukaraja, Karangnunggal
8	Balai Benih Ikan	BBI Rancapaku, BBI Padakembang
9	Pasar Ikan	Pasar Ikan Jatihurip, Pasar Ikan Singaparna, dan Pasar Ikan Padakembang

Di samping unit operasional teknis dibawah UPT tersebut diatas, terdapat unit operasional teknis yang juga melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Unit-unit tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Unit Operasional Teknis lainnya

No	Unit Teknis	Instalasi	Fungsi Pelayanan Utama
1.	Pos Inseminasi Buatan (IB)	Cikalong, Cibalong, Jatiwaras, Karangnunggal, Sukaraja, Bantarkalong	- Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) untuk sapi potong
2.	Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	Cikatomas, Karangnunggal, Pagerageung	- Pelayanan Pemeriksaan dan

			Pengobatan Penyakit Hewan
--	--	--	---------------------------

Sarana Prasarana yang dimiliki berupa Gedung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, Bangunan UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Balai Benih Hortikultura dan Perkebunan, Bangunan Instalasi UPT Sapi Potong Tawang dan UPT Kambing PE Malaganti, RPH Manonjaya, RPH Singaparna dan RPH Ciawi, Puskesmas Wilayah I,II,III, Laboratorium Veteriner, Pasar Hewan Manonjaya, Pasar Hewan Padakembang, Pasar Hewan Ciawi, Pasar Hewan Pancatengah dan 39 BP3K di 39 Kecamatan.

1.3.3. Sarana Prasarana

Tabel 1.5. Sarana Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Gedung Kantor	130	
	Ruang Kepala	1	
	Ruang Rapat Pimpinan	1	
	Aula	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Kasubag	3	
	Ruang Kepala Bidang	6	
	Ruang Kepala Seksi	18	
	Ruang Pelayanan (front office)	1	
	Ruang Pengolahan (back office)	0	
	Ruang Penerbitan	0	
	Ruang Arsip	1	

	Ruang Tunggu	1	
No.	Uraian	-	Ket
	Loket Pembayaran	-	
	Loket Informasi & Pengaduan	-	
	Ruang Rokok	1	
	Ruang Laktasi	-	
	Ruang Satpam	1	
	Ruang Serbaguna	-	
	Ruang Baca dan Bermain Anak	-	
	Musholla	1	
	Pantry	-	
	Kamar Mandi/WC	8	
2.	Kendaraan Roda 4	22	
3.	Kendaraan Roda 2	312	
4.	Komputer/PC	46	
5.	Laptop	24	
6.	Printer	32	
7.	Server	1	
8.	Telephone	1	
9.	Faximili	1	
10.	Infocus	5	
11.	Layar Infocus	2	
12.	Internet	6	
	Jaringan Speedy 100 Mbs	-	
13.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan :		
	E-mail	1	

	disperta@tasikmalayakab.go.id		
	Local Area Network Sistem Informasi Manajemen Perizinan (SIM Perizinan)	1	
14.	Tablet	-	
15.	Mesin Penghancur Kertas	12	
16.	Scanner	10	
17.	Digital Kamera	6	
18.	Televisi	2	
19.	USB Adapter	-	
20.	Handphone	-	
21.	Standing Bracket	-	
22.	CCTV	-	
23.	Pendingin Ruangan	20	
24.	Tabung Pemadam Kebakaran	-	
25.	Kursi Tunggu Tamu	14	
26.	Kursi Sofa	14	
No.	Uraian	-	Ket
27.	Meja Kerja	88	
28.	Meja Pelayanan	2	
29.	Kursi Kerja	67	
30.	Lemari Kayu	16	
31.	Lemari Besi	34	
32.	Rak Arsip	7	
33.	Brankas	1	
34.	Perosotan Anak	-	

35.	Kursi Sofa Baca	-	
36.	Rak Buku Minimalis	-	
37.	Meja Popok Laktasi	-	
38.	Lemari Es Laktasi	-	

1.4. Isu Aktual

Isu aktual yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan
 2. Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian
 3. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan pertanian
 4. Keterbatasan akses petani terhadap lembaga permodalan
 5. Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian
 6. Dampak Perubahan iklim (DPI)
 7. Masih rendahnya daya saing kompetitif dan komparatif
 8. Masih tingginya penggunaan pupuk dan pestisida an organik
 9. Optimalisasi fungsi lahan pangangan sesuai UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 10. Pengembangan Kawasan Peternakan yang terintegrasi
 11. Penyediaan bibit dan pengembangan sumberdaya genetik lokal
 12. Perluasan areal HMT/HPT dan penyediaan pakan berkualitas
 13. Peningkatan daya saing, nilai tambah dan kualitas produk peternakan;
 14. Pengendalian Kesehatan Hewan
 15. Penerapan kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan.
- Kerusakan lingkungan terutama berkaitan dengan perubahan

iklim, yang sangat erat hubungannya dengan pengelolaan hutan dan sumberdaya lahan, selain dampak yang lainnya seperti banjir, kekeringan dan erosi;

16. Terjadinya degradasi fungsi lahan yang menyebabkan munculnya lahan-lahan potensial kritis;
17. Rendahnya tingkat produksi dan produktifitas budidaya tanaman perkebunan, yang dikhawatirkan akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan dan tanaman;
18. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan;
19. Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan, sehingga mengakibatkan pendapatan petani rendah;
20. Diversifikasi usaha perkebunan belum dilaksanakan dengan baik dan terintegrasi usaha budidaya pertanian lainnya;
21. Kelembagaan petani usaha perkebunan belum tertata dengan baik.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LAKIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bagian ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan usatama (strategis issue) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
BAB II	Perencanaan Kinerja

	Diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kenierja tahun yang bersangkutan
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis kinerja, serta realisasi anggaran
BAB IV.	PENUTUP
	Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi
LAMPIRAN	Formulir Renstra Perjanjian Kinerja Formulir Rencana Kerja Tahunan Lampiran Pengukuran Kinerja Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya disusun atas dasar kebutuhan organisasi untuk mengantisipasi dinamika pembangunan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya

diharapkan dapat mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang sehingga ada pengakuan (*recognized*) dan respon dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2.1.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu: ***“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”***.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan

4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

2.1.2. Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki instansi. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan akan lebih terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya memiliki sasaran strategis meningkatkan ketahanan pangan, produksi pertanian dan perikanan yang meliputi hasil produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, hasil peternakan, perikanan serta sarana pendukung pertanian. **Sasaran, Program dan Kegiatan** yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dengan mengacu kepada Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Pencapaian sasaran dan program secara terpadu dan menyeluruh maka ditetapkan rencana kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya yang dijabarkan melalui beberapa Program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Penyuluhan Pertanian.

Perjanjian kinerja awal merupakan lampiran/dokumen Lakip ini, sedangkan perjanjian kinerja perubahan menjadi komponen penting pengukuran kinerja. Adapun Perjanjian kinerja perubahan sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURAEDIDIN, S.IP
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADE SUGIANTO
Jabatan : Bupati Tasikmalaya
selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, 16 November 2022

Pihak Kedua


ADE SUGIANTO

Pihak Pertama


NURAEDIDIN, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650504 198403 1 001

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	925.327.863	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.402.240.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.675.723.700	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.775.354.600	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.122.437.200	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	33.169.906.452	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	28.697.841.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	28.014.872.013	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	472.984.000	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	200.000.000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.610.567.150	

BUPATI TASIKMALAYA



ADE SUGIANTO

Singaparna, 16 November 2022

**KEPALA DINAS PERTANIAN,
KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**



NURAEDIDIN, S.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650504 198403 1 001

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

SASARAN		TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		
1	Meningkatnya penyuluhan pertanian	54,02	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
2	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1,04 %	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
5	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan yang ASUH	1,10 %	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
6	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	70,34	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
7	Meningkatnya Produksi Perikanan	2,00 %	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	925.327.863	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.402.240.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.675.723.700	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.775.354.600	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.122.437.200	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	33.169.906.452	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	28.697.841.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	28.014.872.013	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	472.984.000	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	200.000.000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.610.567.150	

BUPATI TASIKMALAYA



ADE SUGIANTO

Singaparna, 16 November 2022
KEPALA DINAS PERTANIAN,
KETAHANANAN PANGAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



NURAEIDIN, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650504 198403 1 001

Perjanjian kinerja yang dibuat merupakan pernyataan perjanjian untuk mendukung visi yang ingin diwujudkan pemerintah daerah yaitu ***“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”*** yang diimplementasikan ke dalam misi ke 3 yaitu *“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata”* dalam mewujudkan tujuan khususnya pembangunan pertanian. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian, Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat diuraikan secara spesifik mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah	1.Meningkatnya penyuluhan pertanian	1. Mengoptimalkan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian;	1. Pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian;
	2. Meningkatkan rata-rata	1. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai	2. Pemanfaatan teknologi pertanian

Produksi Tanama Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	dengan good agriculture practices (GAP) serta meningkatkan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati;	yang ramah lingkungan;
	2. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan perkebunan untuk meningkatkan produksi dan produktifitasnya;	3. Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui penerapan teknologi tepat guna dan diversifikasi usaha serta sinergitas perencanaan didukung data dan informasi yang berkualitas;
	3. Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana	4. Penerapan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

		dan prasarana pertanian;	
3. Meningkatnya Produksi Pternakan Yang ASUH	1. Mengoptimalkan Pengembangan Peternakan Berbasis kawasan yang terintegrasi dengan arah kebijakan;		1. Peningkatan populasi Ternak Lokal dengan mesntimulasi usaha budidaya ternak di masyarakat
	2. Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis		2. Peningkatan Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menulat strategis dan zoonosis
4. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi budidaya dan penangkapan ikan.		1. Mengembangkan dan merevitalisasi unit pembenihan serta mengoptimalkan pemberdayaan nelayan tangkap laut dan perairan umum.
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Pangan lokal”, dengan arah kebijakan		1. Mengembangkan dan merevitalisasi kelembagaan pangan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan

Ketersediaan dan Konsumsi	pekarangan menjadi sumber produksi pangan.
---------------------------	--

Perwujudan tujuan dan sasaran tersebut dibantu melalui instrumen dalam Pengelolaan Kinerja melalui Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang menjadi salah satu perhatian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Beberapa instrumen yang sudah diikuti untuk peningkatan kinerja pada fase perencanaan.

**Tabel 2.2 Kesesuaian Sasaran Strategis dan Program
DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Yang Mendukung	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
					(Rp)	(Rp)
1	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	54,02	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.610.567.150	2.503.047.925
2	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Persentase Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1,00	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	477.441.000	455.903.200

3	Meningkatnya Produksi Peternakan	Prosentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Yang ASUH	1,00	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	28.220.400.000	27.332.280.974
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	27.559.872.013	23.626.010.395
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	472.984.000	468.715.175
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rata-Rata Konsumsi Energi Dan Protein Dalam Bahan Pangan Per Kapita	3,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	975.327.863	965.163.000
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan	3.402.240.000	3.365.984.340

				Pangan Masyarakat		
5	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	2,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.675.723.700	3.222.143.868
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.775.354.600	5.599.171.760
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.122.437.200	1.090.902.061

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan Tupoksinya. Sebagai penjabaran lebih lanjut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merumuskan Tujuan yaitu “Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah” dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyuluhan Pertanian
2. Meningkatnya produksi Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3. Meningkatnya produksi komoditas peternakan yang ASUH
4. Meningkatnya Ketahanan Pangan
5. Meningkatnya Produksi Perikanan

3.1.1. Indikator Capaian Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2022

- a. Capaian Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	IKU DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian IKU
				2022	2022	
1	Meningkatnya penyuluhan pertanian	Capaian Bina Kelompok Tani	%	54,02	40,83	13,19
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,00	0,91	90,78
3	Meningkatnya produksi komoditas peternakan yang ASUH	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH	%	1,00	2,10	210
4	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase rata-rata ketersediaan energi dan protein dalam bahan pangan per kapita	%	3,00	3,27	127,50

5	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	2,00	2,25	102,50
---	---------------------------------------	---	---	------	------	--------

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	% thdp Th. 2022	Pencapai an thdp Target
	Urusan Pilihan Pertanian						
1	Produksi Tanaman Pangan	Ton	935.233	974.576	811.061	-13,28	83,22
	<i>Produksi padi</i>	<i>Ton</i>	819.450	783.866	736.052	-10,18	93,90
	<i>Produksi palawija</i>	<i>Ton</i>	115.783	190.710	75.009	-35,22	39,33
	Meningkatnya kualitas dan						

	ketersediaan sumberdaya pertanian :						
	Meningkatnya perluasan pertanian organik	Ha	0	8.650	1.811	<i>#DIV/0!</i>	20,94
	Perluasan Irigasi Tersier;	Ha	0	1.400			
	Pengembangan Alsln pra dan pasca panen :	Unit	64	65			
	- Alsln Pra panen	Unit	38	38			
	- Alsln Pasca Panen	Unit	26	26	42	61,54	159,94
	Peningkatan Mutu Tanaman Pangan	Unit	4	4			
	.- Sertifikasi Budidaya Tanaman Pangan		1	1	0		
	.- Sertifikasi Produk Tanaman Pangan		3	3	0		

Perluasan areal lahan pertanian (cetak sawah)	Ha	-					
Pengembangan sumber sumber air	Unit	91	92	77	-15,38	83,78	
Embung		15	15	-			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi		33	33	48			
Pembangunan/P erbaikan Damparit		11	11	3			
Irigasi Perpipaan		6	6	-			
Irigasi air tanah dangkal		16	16	8			
Pengembangan jalan usahatani		10	10	18			
Pengembangan jalan produksi		0					
Cakupan bina kelompok petani	%	24,53	54,02	22,05	-10,10	40,83	
<i>Jumlah kelompok tani penerima manfaat</i>	<i>Kel.</i>	<i>803</i>	<i>1.239</i>	<i>799</i>	-0,50	64,47	
Meningkatnya tingkat	Kel.	3273	2.497	3.623	10,69	145,10	

	kemampuan kelompok tani						
	<i>Pemula</i>		2069	1.432	2.167		
	<i>Lanjut</i>		1122	926	1.122		
	<i>Madya</i>		36	134	36		
	<i>Utama</i>		0	4	-		
2	<i>Produksi Hortikultura</i>		251.809	191.959	231.554	-8,04	120,63
3	<i>Produksi Komoditas Perkebunan</i>	<i>Ton</i>	44.223	44.675	56.888	28,64	127,34
	<i>Pengembangan Unit Pengolah Outcome (UPH) Komoditas Perkebunan</i>	<i>Unit</i>	-	2	1		
4	<i>Produksi Peternakan</i>	<i>Ton</i>	90.533	67.747	281.101	210,50	414,93
	<i>Produksi daging</i>	<i>Ton</i>	44.978	50.314	248.731		
	<i>Produksi telur</i>	<i>Ton</i>	40.028	13.761	28.342		

	<i>Produksi susu</i>	<i>Ton</i>	<i>5.527</i>	<i>3.673</i>	<i>4.028</i>		
	Jumlah Populasi Ternak		32.760.848	6.256.795	35.812.239		
	<i>Populasi ternak ruminansia besar</i>	<i>Ekor</i>	<i>61.772</i>	<i>39.403</i>	<i>57.453</i>		
	<i>Populasi ternak ruminansia kecil</i>	<i>Ekor</i>	<i>546.526</i>	<i>279.638</i>	<i>570.549</i>		
	<i>Populasi Ternak Unggas</i>	<i>Ekor</i>	<i>32.152.550</i>	<i>5.937.755</i>	<i>35.184.237</i>		
	Jumlah Hewan Yang Sehat dan Produk Asala Hewan yang ASUH		4.456	4.501	8.823		
	<i>Vaksinasi A1</i>	<i>Ekor</i>	<i>2.500</i>	<i>2.525</i>	<i>5.000</i>		
	<i>Vaksinasi rabies</i>	<i>Ekor</i>	<i>372</i>	<i>376</i>	<i>1.000</i>		
	<i>Eliminasi HPR</i>	<i>Ekor</i>	<i>-</i>				
	<i>Meningkatnya pelayanan pengobatan penyakit hewan</i>	<i>Ekor</i>	<i>632</i>	<i>638</i>	<i>2.391</i>		
	<i>Meningkatnya Pelayanan Kesmavet :</i>			<i>0</i>			

	<i>Pemeriksaan Hewan Qurban</i>	<i>Ekor</i>	<i>804</i>	<i>812</i>	<i>400</i>		
	<i>Prosentase Fasilitasi Sertifikasi NKV</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>101</i>			
	<i>Fasilitasi NKV</i>	<i>Kali</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>		
	<i>Jumlah unit usaha peternakan</i>	<i>Unit</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>30</i>		
	<i>Monitoring dan Surveillance Residu Kimia dan cemaran mikroba produk asl peternakan</i>	<i>Ekor</i>	<i>30</i>	<i>30</i>			
5	Produksi Perikanan	Ton	73.740,17	79.544	81.534	10,57	102,50
	Perikanan Budidaya	Ton	72.161,18	77.797	80.253		
	Perikanan Tangkap	Ton	1.578,99	1.747	1281		
6	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	78,50	76,34	81,80	4,20	107,15
	Rata-rata Peningkatan Ketersediaan Energi dan	<i>%</i>	<i>2,3</i>	<i>2,00</i>			

Protein Perkapita						
Rata-rata Peningkatan Konsumsi Energi dan Protein Perkapita	%	2,8	2,00	22,78		

3.1.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis:

- 1) *Produksi Komoditas Tanaman Pangan* pada Tahun 2022 mencapai 811.061 ton atau tidak mencapai target (83,22%), sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 lebih rendah yaitu (-13,80%) terjadinya penurunan produksi luas panen turun pergeseran tanam ke tanaman palawija dan cuaca hujan terus menerus sehingga menyebabkan tanaman banyak yang tidak berisi (hampa) khususnya pada padi jika dibandingkan dengan tahun lalu.
- 2) *Produksi Komoditas Hortikultura* yaitu produksi sayuran, dan buah-buahan. Komoditas sayuran pada umumnya ditanam di lahan bukan sawah dalam bentuk hamparan dengan perlakuan teknologi yang sudah intensif. Untuk komoditas hortikultura produksi 231.554 ton pada Tahun 2022 atau naik sebesar 20,63% dari target.
- 3) *Produksi Komoditas Perkebunan*. Produksi komoditas perkebunan pada tahun 2022 mencapai 56.888,- ton (127,34%) dari target

sebesar 44.675 ton. Pencapaian realisasi ini dikarenakan adanya kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas perkebunan serta penanaman, sehingga produktivitas meningkat. Disamping itu dtunjang dengan adanya pengendalian hama terpadu, pelatihan petani untuk meningkatkan SDM kelompok baik dalam hal kelembagaan maupun budidaya.

- 4) *Produksi Komoditas Peternakan* terdiri dari produksi daging, telur dan susu. Tahun 2022 produksi komoditas peternakan mengalami peningkatan dibanding dengan Tahun 2021 (210,50%) maupun pencapaian terhadap target Tahun 2022 yaitu dari produksi 90.533 ton Tahun 2021 menjadi 281.101 ton pada Tahun 2022, peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan produksi telur dan produksi susu. Produksi daging meningkat karena keberhasilan pemerintah daerah dalam kegiatan inseminasi buatan yang meningkatkan populasi sapi potong meskipun ditengah wabah PMK, kegiatan penanganan gangguan reproduksi (gangrep) pun berjalan sukses sehingga meningkatkan kesehatan ternak dan meningkat pula populasinya. populasi unggas pun meningkat karena kebutuhan masyarakat akan pemenuhan daging unggas yang lebih ekonomis dari pada ruminansia. Produksi komoditas peternakan tidak terlepas Jumlah Hewan Yang Sehat dan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal atau ASUH, Vaksinasi AI, Rabies, Eliminasi HPR. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular (Vaksinasi AI, Vaksinasi rabies, Eliminasi HPR) tercapai melebihi target 98,02% dibandingkan tahun 2021, peningkatan pelayanan pengobatan penyakit hewan peningkatan pelayanan Kesmavet (pemeriksaan hewan kurban) dan fasilitasi penerbitan Nomor Kontrol Veteriner

(NKV). Ketidaktercapaian hal tersebut dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana, jumlah pegawai dan tersebarnya lokasi penyembelihan. Sedangkan untuk monitoring dan pengawasan residu kimia dan cemaran mikroba produk asal ternak menurun, hal ini dikarenakan tidak adanya atau sedikitnya aktif *service* dari tingkat Provinsi dan Balai Veteriner Subang dalam rangka monitoring residu kimia dan cemaran mikroba produk asal ternak ke pasar-pasar tradisional.

- 5) Kabupaten Tasikmalaya sejak dulu dikenal sebagai sentra produksi perikanan budidaya. Produksi ikan budidaya dari Kabupaten Tasikmalaya mencapai 80.253 ton pada tahun 2022, dimana produksi ikan nila menempati produksi terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia.
- 6) Pada tahun 2021 Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tasikmalaya mencapai 78,50 dari skor ideal 100. Pada tahun 2022 PPH Kabupaten Tasikmalaya ditargetkan meningkat menjadi 81,80. Realisasi perhitungan PPH tahun 2022 mencapai 80,25. Sehingga skor PPH sebagai indikator ketahanan pangan tahun 2022 dapat belum mencapai target (99,36%). PPH tersebut dihitung berdasarkan kelompok pangan Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah dan lain-lain.

3.1.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{EFEKTIFIVITAS} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja.

$$\text{EFEKTIFIVITAS} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.

3.1.4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis Keberhasilan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja menggunakan analisis SWOT:

- a. ANALISIS INTERNAL (*STRENGTH AND WEAKNESESS* / KEKUATAN DAN KELEMAHAN)

FAKTOR <i>STRENGTHS</i>/ KEKUATAN	FAKTOR <i>WEAKNESESS</i>/KELEMAHAN
a. Memiliki kewenangan dengan Perbup Nomor 67 tahun 2016	a. Motivasi kerja aparatur belum optimal
b. Keberadaan kelembagaan pertanian UPT/UPTD	b. Database yang masih kurang baik.
c. Tersedianya aparatur pertanian	c. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia

Penjelasan Kekuatan

- (1) Peraturan merupakan dasar yang kuat dalam kewenangan penyelegaraan suatu instansi, maka dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 menjadi dasar yang kuat dan payung hukum dalam penyelenggaraan suatu instansi.
- (2) Keberadaan kelembagaan pertanian seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas seyogyanya menjadi kekuatan dalam membantu penyelenggaraan suatu instansi.

- (3) Tersedianya aparatur pertanian merupakan modal utama dalam pelaksanaan suatu penyelenggaraan instansi.

Penjelasan Kelemahan

- (1) Motivasi kerja yang belum optimal didasari pada penempatan aparatur yang kurang sesuai dengan pendidikannya dapat menjadi pemicu kurangnya optimalisasi kinerja aparatur.
- (2) Database yang masih kurang baik, karena belum optimalnya koordinasi antar sektor pertanian.
- (3) Sarana dan prasarana pada kenyataannya untuk dinas pertanian belum terealisasi secara nyata : kantor dinas terpisah jauh dengan kawasan perkantoran, UPT wilayah belum memiliki kantor, terbatasnya sarana mobilitas dan informasi sehingga menjadi kendala baik dalam koordinasi, kearsipan maupun aksesibilitas.

b. ANALISIS EKSTERNAL (*OPPORTUNITIES AND THREATS / PELUANG DAN ANCAMAN*)

FAKTOR <i>OPPORTUNITIES/</i> PELUANG	FAKTOR <i>THREATS /</i> ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. b. Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. c. Terbukanya pangsa pasar untuk komoditas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/hewan). b. Menurunnya minat masyarakat untuk usaha tani.

d. Adanya UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan.	c. Adanya globalisasi pasar bebas d. Alih fungsi lahan pertanian tinggi
---	--

Penjelasan Peluang

- (1) Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam, wilayah binaan yang terdiri dari 39 kecamatan dengan berbagai potensi unggulan komoditas baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (2) Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin meningkat, dengan indikasi penerapan adopsi inovasi teknologi pertanian oleh para petani yang salah satunya Kabupaten Tasikmalaya sebagai penghasil dan sebagai eksportir beras organik di Jawa Barat dan penghasil manggis terbesar di Jawa Barat merupakan suatu peluang untuk lebih dikenal ke khalayak luas.
- (3) Pangsa pasar selalu terbuka mengikuti *trend* dan kebutuhan maka ini menjadi suatu peluang yang bisa dimanfaatkan.
- (4) UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan yang menjadi acuan penyusunan Perda tentang konversi lahan dan perlindungan lahan berkelanjutan.

Penjelasan Ancaman

- (1) Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/hewan), Tasikmalaya merupakan daerah yang rawan bencana khususnya gempa dan tanah

longsor menjadi suatu ancaman bagi wilayah-wilayah binaan Dinas Pertanian disamping gangguan OPT.

- (2) Menurunnya minat masyarakat terhadap usahatani terutama generasi muda yang menganggap bahwa usaha pertanian kurang bergengsi selain itu petani di wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah masyarakat tani subsisten.
- (3) Pasar bebas dan globalisasi menjadi suatu ancaman bagi masyarakat yang belum siap mengikuti arus globalisasi.
- (4) Alih fungsi lahan pertanian tinggi akan menyebabkan lahan-lahan pertanian yang potensial semakin berkurang.

Penggambaran Matriks Analisis SWOT

INTERNAL	<u>Strenght</u>	<u>Weaknesses</u>
EKTERNAL	a. Memiliki kewenangan dengan Perbup No.67 tahun 2016	a. Motivasi kerja aparatur belum optimal
	b. Keberadaan kelembagaan pertanian UPTD	b. Database yang masih kurang baik.
	c. Tersedianya aparatur pertanian	c. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia
<u>Opportunities</u>	<u>Strategi SO</u>	<u>Strategi WO</u>
a. Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.	a. Memanfaatkan peraturan daerah No.67 tahun 2016 dalam penggunaan sarana prasarana untuk mendukung pembangunan pertanian	a. Menciptakan konsep panduan mengenai kepemimpinan dan penciptaan tatanan kerja yang kondusif

<p>b. Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang.</p> <p>c. Terbukanya pangsa pasar untuk komoditi pertanian</p> <p>d. Adanya UU No. 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan.</p>	<p>b. Memanfaatkan keberadaan UPT untuk menginventarisir potensi wilayah yang belum tergali dengan baik.</p> <p>c. Mengoptimalkan keberadaan aparatur pertanian untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif di wilayah binaannya khususnya di pedesaan</p> <p>d. Penyusunan Perda tentang lahan berkelanjutan</p>	<p>b. Membentuk struktur intern yang lebih solid serta penempatan aparatur yang profesional</p> <p>c. Memperbaiki dan melengkapi database supaya lebih <i>up to date</i></p> <p>d. Menyelenggarakan diklat teknis substantif pertanian</p> <p>e. Pembenahan dan pembangunan kantor-kantor UPT wilayah</p> <p>f. Pemutakhiran data lahan pertanian yang potensial untuk dijadikan lahan berkelanjutan</p>
<p>Threats</p> <p>a. Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/hewan).</p> <p>b. Menurunnya minat masyarakat untuk usaha tani.</p>	<p>Strategi ST</p> <p>a. Memasyarakatkan usahatani konservasi yang berwawasan lingkungan</p> <p>b. Mengoptimalkan keberadaan kelembagaan sesuai dengan payung hukum yang ada</p> <p>c. Memberdayakan keberadaan UPT untuk menginventarisir daerah-</p>	<p>Strategi WT</p>

c. Adanya globalisasi pasar bebas	daerah yang berpotensi rawan bencana	
d. Alih fungsi lahan pertanian tinggi	d. Mengoptimalkan keberadaan aparatur pertanian untuk meningkatkan minat masyarakat melalui penyuluhan dan penerapan usahatani berwawasan agribisnis	
	e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui pendekatan RTRW	

3.1.5. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan didukung oleh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Alokasi Belanja Tidak Langsung dengan pagu sebesar Rp. 31.622.596.979,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.103.278.137,- (97,19%). Belanja tidak langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai (Gaji Pokok, Tunjangan Struktural/Fungsional, Tunjangan Keluarga, TPP dan insentif.

Belanja Langsung mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 77.197.186.999, -dan telah terserap sebesar Rp. 71.414.353.216,- (91,04%). Adapun rincian belanja langsung urusan pertanian, pangan dan kelautan perikanan yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 975.327.863 dengan realisasi Rp. 965.163.000 (98,96 %) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAK. Untuk outputnya adalah Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun 1 Unit, Jumlah Rumah RMU dan Bed Dryer 1 Unit dan Jumlah Lantai Jemur 1 Unit. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan di Kabupaten Tasikmalaya.

2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan jumlah anggaran Rp. 2.162.240.000 dengan realisasi Rp. 2.162.240.000 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Output : Tersalurkannya bantuan 400 KWT. Outcome : Terpenuhinya program penanganan inflasi.

- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan jumlah anggaran Rp. 425.000.000 dengan realisasi Rp. 423.621.400 (99,68%) dan realisasi fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Output : Jumlah Fasilitas LDPM (Bangunan/Gedung LDPM) yang dibangun 1 unit dan Jumlah Bantuan Mesin RMU (Rice Milling Unit) yang disalurkan 1 unit. Outcome : Terpenuhinya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kotadengan jumlah anggaran sebesar Rp. 405.000.000 dengan realisasi Rp. 374.780.990 (92,95%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebanyak 30 Ton. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokaldengan
-

jumlah anggaran sebesar Rp. 410.000.000 dengan realisasi Rp. 405.341.950 (98,86%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAK dan DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah bantuan sarana pemanfaatan pekarangan yang disalurkan 18 paket. Untuk outcomenya adalah terberdayakannya masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Tasikmalaya.

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

a. Kegiatan Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai ,danau,waduk,rawa,dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.503.173.700 dengan realisasi Rp. 2.427.143.868 (96,96%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAK dan DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Perahu Kapal < 5GT 5 unit, Jumlah Perahu Kapal < 3GT yang tersalurkan 3 unit, Jumlah Sarana Pendukung Penangkapan Ikan yang tersalurkan 60 unit, Jumlah Jaring Abun yang tersalurkan 70 pcs, Jumlah Mesin Perahu < 5GT yang tersalurkan 10 unit, Jumlah Sarana Prasarana Keselamatan Nelayan yang tersalurkan 121 unit. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :
- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan jumlah anggaran Rp. 1.097.550.000 dengan realisasi Rp. 720.000.000 (66,50%) dan realisasi Fisik sebesar 66,00% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah nelayan kecil yang berkembang kapasitasnya 2266 orang. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya pengembangan kapasitas nelayan kecil di Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan jumlah anggaran Rp. 75.000.000 dengan realisasi Rp. 75.000.000 (100%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah pelayanan TPI 12 bulan dan Tersedianya Honorarium UPTD TPI 5 orang. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Tasikmalaya.
4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil dengan jumlah anggaran Rp. 285.000.000 dengan realisasi Rp. 277.116.700 (97,23%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Ekor Benih Ikan Nila, 910 Ekor Kg Pakan Ikan, dan 13 Liter Probiotik. Untuk outcomenya adalah

terpenuhinya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Tasikmalaya.

- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan jumlah anggaran Rp. 400.000.000 dengan realisasi Rp. 387.407.400 (96,85%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Benih Ikan Gurame yang tersalurkan 2500 Ekor, Jumlah Benih Ikan Nila yang tersalurkan 25.000 Ekor, Jumlah Pakan Ikan yang tersalurkan 5000 Kg, Jumlah Probiotik Ikan yang tersalurkan 10 litter. Untuk outcomenya adalah terfasilitasinya Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil di Kabupaten Tasikmalaya.
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp. 1.584.800.600 dengan realisasi Rp. 1.538.859.360 (97,10%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Benih Ikan Nila yang tersalurkan 275.000 Ekor, Jumlah Benih Ikan Koi yang tersalurkan 3000 ekor, Jumlah Pakan Ikan yang tersalurkan 18.200 Kg, Jumlah Bioflok yang tersalurkan 2 set. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Tasikmalaya.
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kotadengan jumlah

anggaran Rp. 3.505.554.000 dengan realisasi Rp. 3.395.788.300 (96,68%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU dan DAK. Untuk outputnya adalah Jumlah Calon Induk Gurame (3 Betina 1 Jantan) yang tersalurkan 28 paket, Jumlah Ikan Nilem yang tersalurkan 646.250 Ekor, Jumlah Pakan dan Benur Udang Vaname yang tersalurkan 6 paket, Jumlah Pakan Ikan yang tersalurkan 105.300 Kg, Jumlah Probiotik ikan yang tersalurkan 220 liter, Jumlah Benih Ikan Nila yang tersalurkan 180.000 Ekor, Jumlah Benih Ikan Koi yang tersalurkan 800 Ekor. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya sarana Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Tasikmalaya.

5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 - a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kotatertdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran seharga Rp. 1.122.437.200 dengan realisasi Rp. 1.090.902.061 (97,19%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU dan DAK. Untuk outputnya adalah Jumlah Ikan Konsumsi Ikan Bandeng yang disalurkan 700 Kg, Jumlah Ikan Konsumsi Ikan Layang yang disalurkan 600 Kg, Jumlah Ikan Konsumsi Ikan Lisong yang disalurkan 600 Kg, Jumlah Ikan Konsumsi Ikan Tongkol yang disalurkan 700 Kg, Jumlah Paket olahan ikan yang disalurkan 1000 Box, Jumlah Goodybag (Ikan

Olahan) yang disalurkan 1000 Buah, Jumlah Siomay Ikan yang disalurkan 1000 Buah, Jumlah Badeng yang disalurkan 100 Unit, Jumlah UPI yang direnovasi 3 unit, Jumlah Pasar Ikan yang direhabilitasi 1 unit. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan di Kabupaten Tasikmalaya.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 66.669.100 dengan realisasi Rp. 66.511.800 (99,76%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah tersedianya Dokumen Perubahan Renja Tahun 2022, Dokumen Rancangan Awal Renja Tahun 2023, Dokumen Renja Tahun 2022. Untuk outcomenya adalah tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas.
- Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 79.006.900 dengan realisasi Rp. 78.835.400 (99,78%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah tersedianya dokumen hasil evaluasi kinerja sebanyak 7 (tujuh) dokumen yang diantaranya dokumen Cascading, IKU, Evaluasi Rencana Aksi, Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja, Perjanjian Kinerja Eselon II, Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi. Untuk

outcomenya adalah tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas.

- b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat Daerah terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :
- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 31.020.066.979 dengan realisasi Rp. 27.103.278.137 (87,37%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 (Satu) tahun. Untuk outcomenya adalah meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan yaitu :
- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 128.531.037 dengan realisasi Rp. 125.630.189 (97,74%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan dengan jumlah sebesar Rp. 98.768.036 dengan realisasi Rp. 98.763.910 (100%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah tersedianya barang cetakan dan pengandaan

selama 12 bulan. Untuk outcomenya adalah meningkatnya daya dukung administrasi pelayanan kantor.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi Rp. 30.000.000 (100%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan. Untuk outcomenya adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- Penyediaan Bahan /Material dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 106.193.800 dengan realisasi Rp. 99.6490.390 (93,83%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah tersedianya bahan / material kantor selama 12 bulan. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya kebutuhan bahan/material Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- Fasilitas Kunjungan Tamu dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 70.000.000 dengan realisasi Rp. 69.940.000 (99,91%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah tersedianya kebutuhan makan dan minum tamuselama 12 bulan. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggran sebesar Rp. 107.930.000 dengan

realisasi Rp. 107.741.422 (99,83%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 12 bulan. Untuk outcomenya adalah bertambahnya informasi hasil koordinasi dan konsultasi selama 12 Bulan.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan jumlah anggran sebesar Rp. 269.691.000 dengan realisasi Rp. 233.867.059 (86,72%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 Bulan.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah anggran sebesar Rp. 936.856.600 dengan realisasi Rp. 932.261.888 (99,51%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah terbayarnya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan. Untuk outcomenya adalah meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 216.663.000 dengan realisasi Rp. 209.929.300 (96,89%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan selama 12 bulan. Untuk outcomenya adalah bertambahnya masa manfaat kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 39.530.000 dengan realisasi Rp. 33.403.000 (84,50%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya selama 12 bulan. Untuk outcomenya adalah bertambahnya masa manfaat gedung kantor dan bangunan lainnya.

7. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 477.441.000 dengan realisasi Rp. 455.903.200 (95,49%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU dan DBHCHT. Untuk outputnya adalah jumlah dokumen pengawasan 1 dokumen. Untuk outcomenya adalah

terawasinya penggunaan sarana pendukung pertanian di Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak ,dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota lain terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - Penjaminan Peredaran HPT,Bahan Pakan/pakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 99.999.900 (100%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Operasional Pelayanan UPTD Perbibitan. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya hijauan pakan ternak di Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1(satu)Daerah Kabupaten/Kota lain terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain dengan jumlah anggran sebesar Rp. 28.120.400.000 dengan realisasi Rp. 27.232.281.074 (96,84%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain. Untuk outcomenya adalah terpenuhinya Benih/Bibit Ternak di Kabupaten Tasikmalaya.

8. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

- a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :

- Pengelolaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp. 149.928.110 (99,95%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Calon Benih Padi Bersih 50 kg, Jumlah Calon Benih Padi Gogo 50 kg, Jumlah Calon Benih Padi Khusus 50 kg, Luas Kebun Bibit buah-buahan dan perkebunan yang dikelola 9 ha. Untuk outcomenya adalah terkelolanya lahan pertanian Pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.
- b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.480.727.363 dengan realisasi Rp. 6.328.710.200 (97,65%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU dan DAK. Untuk outputnya adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi 13 unit, Terbangunnya Irigasi Air Tanah Dangkal 9 unit, Terbangunnya Dam Parit 4 unit, Terbangunnya Embung 3 Unit. Untuk outcomenya adalah meningkatnya manfaat jaringan irigasi usaha tani.
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.301.804.650 dengan realisasi Rp. 3.290.337.100 (100%) dan realisasi

Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU dan DAK. Untuk outputnya adalah Terbangunnya Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi 10 unit, Tersalurkannya Bantuan Hultipator 1 unit. Untuk outcomenya adalah meningkatnya manfaat jalan usaha tani.

- Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dengan realisasi Rp. 249.700.000 (99,88%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU dan DAK. Untuk outputnya adalah Terbangunnya DAM Parit. Untuk outcomenya adalah meningkatnya manfaat dam parit.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 550.000.000 dengan realisasi Rp. 506.424.800 (92,08%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Peningkatan Prasarana Rumah Potong Hewan 1 unit. Untuk outcomenya adalah meningkatnya pelayanan RPH.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.977.340.000 dengan realisasi Rp. 13.250.838.295 (78,05%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU dan DAK. Untuk outputnya adalah terwujudnya kawasan agribisnis padi organik 500 ha. Untuk outcomenya adalah meningkatnya kawasan agrisinis padi organik.

c. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun /Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun /Galur ternak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 305.000.000 dengan realisasi Rp. 285.765.550 (93,69%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah bantuan ternak itik cihateup yang disalurkan 1.694 Ekor. Untuk outcomenya adalah meningkatnya produksi komoditas peternakan yang ASUH.

9. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 80.330.000 dengan realisasi Rp. 79.759.975 (99,29%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah tersedianya Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Untuk outcomenya adalah terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan dan zoonosis.

b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 294.754.000 dengan realisasi Rp. 291.085.340 (98,76%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU dan DAK. Untuk outputnya adalah tersedianya operasional UPTD Jumlah operasional pelayanan UPTD Puskesmas 3 unit, Jumlah operasional pengelolaan UPTD Lab. Keswan 1 unit. Untuk outcomenya adalah meningkatnya pelayanan UPTD Lab Veteriner dan Puskesmas.
- c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - Pengawasan Peredaran Hewan dan produk Hewan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 97.900.000 dengan realisasi Rp. 97.869.860 (99,97%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah operasional pengelolaan UPTD Pasar Hewan 3 unit. Untuk outcomenya adalah meningkatnya pelayanan Pasar Hewan.

10. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi Rp. 196.260.500 (98,13%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Luas Serangan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 3.426 ha. Untuk outcomenya adalah terkendalinya OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

11. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 66.550.000 (66,55%) dan realisasi Fisik sebesar 67,00% yang anggarannya bersumber dari DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Rekomendasi Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 1 rekomendasi. Untuk outcomenya adalah Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.

12. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa dengan jumlah anggran sebesar Rp. 1.483.478.000 dengan realisasi Rp. 1.477.238.475 (99,58%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAK dan DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Di tingkatkan Kapasitasnya 39 kecamatan. Untuk outcomenya adalah

meningkatnya pengetahuan petani tembakau dan pelayanan BPP di Kabupaten Tasikmalaya.

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan jumlah anggran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 98.024.000 (98,02%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAK dan DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 39 kecamatan. Untuk outcomenya adalah meningkatnya pengetahuan petani tembakau dan pelayanan BPP di Kabupaten Tasikmalaya.
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dengan jumlah anggran sebesar Rp. 1.027.089.150 dengan realisasi Rp. 927.785.450 (90,33%) dan realisasi Fisik sebesar 100% yang anggarannya bersumber dari DAK dan DAU. Untuk outputnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 39 kecamatan. Untuk outcomenya adalah meningkatnya pengetahuan petani tembakau dan pelayanan BPP di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah serta sasaran selama Tahun Anggaran 2022. Dengan berdasarkan pada LKIP Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan TA. 2022 diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Dinas Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator kinerja secara umum dapat tercapai sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
2. Pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2022 terfokus pada Pembangunan Pertanian Berkelanjutan melalui Peningkatan Produksi Pertanian (Hasil olahan komoditas pertanian, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, produksi perkebunan dan produksi hasil peternakan), serta Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan yang didukung melalui Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

4.2. Permasalahan dan Solusi

4.2.1. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan antara lain:

1. Banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian tetapi tidak mempunyai lahan serta menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek

pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan.

2. Teknik budi daya kurang presisi yang dimaksud di sini adalah bertani dengan teknik yang benar dan tepat guna. Di lapangan, pertanian dilakukan berdasarkan naluri dan pengalaman. Jarang sekali petani di Indonesia yang berasal dari kalangan terdidik yang sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang pertanian.
3. Krisis regenerasi petani muda Rendahnya minat regenerasi muda untuk terjun ke dunia pertanian terlihat dari statistik sebesar 61% petani berusia >45 tahun. Padahal, generasi muda adalah generasi penerus sekaligus kunci keberhasilan sektor pertanian.
4. Belum terfokusnya atau tersentralisasinya pengembangan komoditas pertanian khususnya komoditas unggulan.
5. Ketersediaan infrastruktur dan sarana pertanian belum begitu memadai yang diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur dan sarana pertanian
6. Kekurangan modal yang dihadapi petani menjadi isu klasik karena memang sifat usaha bidang pertanian belum mendapat dukungan yang penuh dari pihak perbankan.
7. Belum adanya konsep wawasan pertanian terpadu (*integrated farming system*) dalam membangun pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan,) serta dukungan dari perindustrian guna mencapai sistem agribisnis.
8. Perubahan iklim menjadi kendala yang serius karena iklim menjadi tidak menentu dan susah diprediksi.
9. Belum sampainya informasi harga pasar komoditas pertanian yang transparan kepada petani dan juga harga yang selalu fluktuatif

serta ketergantungan kepada tengkulak dan pedagang besar yang sering merugikan petani.

10. Masih lemahnya penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang ditandai antara lain dengan penggunaan pupuk dan bahan kimia anorganik yang berlebihan serta perkembangan teknologi seringkali menyebabkan tergerusnya kearifan lokal dan potensi sumberdaya local.
11. Tingkat kesadaran petani terhadap usaha bidang pertanian itu sendiri, yaitu di satu sisi petani menggantungkan hidupnya pada usaha tani tetapi disatu sisi sebagian besar petani tidak bersungguh-sungguh dalam usaha taninya karena hanya dianggap sebagai tradisi saja (subsisten).

4.2.2. Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah:

1. Memberlakukan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan membuat perluasan areal pertanian.
2. Pemerintah melalui kelembagaan pertanian melengkapi pengetahuan masyarakat tani dengan menurunkan penyuluh pertanian.
3. Program petani milenial dan program yess yang mendukung generasi muda dalam bidang pertanian.
4. Mengusulkan pembangunan infrastruktur pertanian seperti kantor UPTD Wilayah dan BPP serta Rehabilitasi Bangunan BPP yang rusak melalui APBD Kabupaten maupun DAK.
5. Melaksanakan pelatihan yang menunjang kualitas pegawai, petani dan kelembagaan pertanian.
6. Memberikan fasilitasi kepada petani untuk memperoleh permodalan

7. Mengoptimalkan koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian.
8. Melaksanakan penataan pola produksi baik jadwal tanam, luas tanam maupun jenis komoditas yang diusahakan, disesuaikan dengan permintaan pasar.
9. Mengoptimalkan komoditas unggulan untuk mempunyai nilai tambah
10. Keberlanjutan pengembangan pertanian ramah lingkungan go organic.
11. Menata dan menumbuhkan kelembagaan petani khususnya kelompok tani dan gapoktan di bidang organisasi, administrasi dan di bidang usaha.